

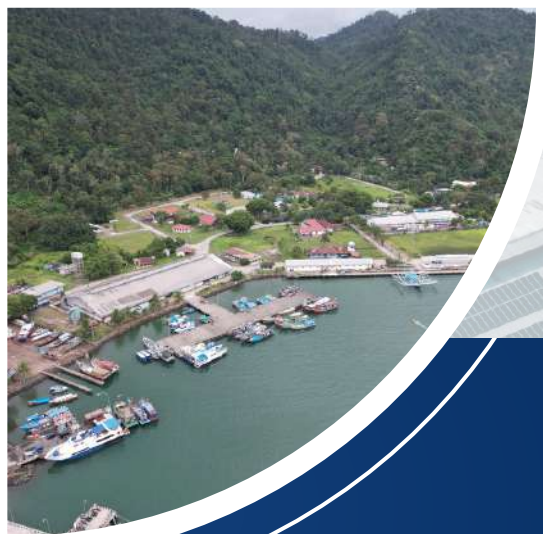


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS



KATA PENGANTAR



Widodo, S.Pi, M.Sc

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan II Tahun 2025" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2025, Rencana Kinerja tahun 2025, dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, 15 Juli 2025

**Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus**



Ringkasan Eksekutif

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 13.840.428.000,- untuk Tahun 2025 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 3.877.186.010,- dengan persentase sebesar 28.01% sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus sampai dengan triwulan II tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 106,37%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus triwulan II tahun 2025

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Triwulan II tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Triwulan II tahun 2025 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2025 Terlampaui).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan II tahun 2025 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan II pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
Latar Belakang	2
Tugas Dan Fungsi.....	3
Fungsi Pemerintahan	3
Fungsi Pengusahaan	3
Peranan Pelabuhan Perikanan	3
Struktur Organisasi.....	4
Sistematika Penyajian	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 6
Visi Dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap.....	7
Tujuan Dan Sasaran Strategis	8
Indikator Kinerja Tahun 2025	9
Rencana Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025	10
Rencana Aksi.....	11
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	 13
Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Analisa Capaian Kinerja.....	16
▪ Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus	16
▪ Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	19
▪ Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	22
▪ Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	24
▪ Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	25
▪ Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	26
▪ Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	27
▪ Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	28
▪ Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan... ..	29
▪ Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	32
▪ Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	33
▪ Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	34
▪ Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	36
▪ Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada	

SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	38
■ Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	40
■ Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	41
■ Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	42
■ Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	43
Akuntabilitas Keuangan	44
BAB IVPENUTUP	45
Kesimpulan.....	46
Rekomendasi Tindak Lanjut	47
Lampiran	48

Daftar Gambar

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus triwulan II tahun 2025	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2025.....	4
Gambar 3. Penerimaan PNBP TW II Tahun 2025	17
Gambar 4. Capaian Volume Produksi.....	20
Gambar 5. Capaian Tingkat Kinerja Pelabuhan.....	24
Gambar 6. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan II tahun 2025	28
Gambar 7. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	29
Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	46

Daftar Tabel

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025	9
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025	10
Tabel 3. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2025	14
Tabel 4. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus	16
Tabel 5. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	17
Tabel 6. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus TW II Tahun 2025	20
Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	20
Tabel 8. Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	23
Tabel 9. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	24
Tabel 10. Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	25
Tabel 11. Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	26
Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	27
Tabel 13. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	29
Tabel 14. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	30
Tabel 15. Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	32
Tabel 16. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024	33
Tabel 17. Capaian Indikator Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	35
Tabel 18. Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	37
Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	38
Tabel 20. Capaian Indikator Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	40
Tabel 21. Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	41
Tabel 22. Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	42
Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	43
Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2025.	44

The background of the slide features an abstract geometric pattern. It consists of numerous blue cubes of varying sizes, some of which are 3D-rendered with visible faces. These cubes are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, interconnected web. The overall aesthetic is modern and technical, suggesting a focus on technology or engineering.

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akunTabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2025-2029. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama Triwulan II tahun 2025 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2025 dan Perjanjian Kinerja.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan

- | | |
|---|---|
| 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; | 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; |
| 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; | 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; |
| 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; | 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; |
| 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; | 10) Pemantauan wilayah pesisir; |
| 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; | 11) Pengendalian lingkungan; |
| 6) Pelaksanaan kesyahbandaran; | 12) Kepabeanan; dan/atau |
| | 13) Keimigrasian. |

Fungsi Perusahaan

- | | |
|--|---|
| 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; | 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; |
| 2) Pelayanan bongkar muat ikan; | 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; |
| 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan; | 8) Wisata bahari; dan/atau; |
| 4) Pemasaran dan distribusi ikan; | 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. |
| 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; | |

PERANAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Merujuk pada fungsi-fungsi utamanya, pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan dan distribusi hasil tangkapan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang secara langsung mendorong peningkatan produksi perikanan.

Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Keberadaan pelabuhan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, mulai dari perdagangan ikan, perbengkelan kapal, penyediaan bahan bakar, es, air bersih, hingga jasa logistik dan pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, pelabuhan menjadi lokus penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pelabuhan perikanan juga diharapkan mampu menjadi unit kerja yang produktif secara ekonomi, dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pelayanan jasa kepelabuhanan, seperti tambat labuh, jasa listrik, air bersih, cold storage, hingga penyewaan lahan dan bangunan. Pendapatan ini tidak hanya berkontribusi bagi negara dan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal untuk pembangunan sektor kelautan yang lebih luas.

Lebih jauh, aktivitas di pelabuhan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan secara langsung melalui layanan pelabuhan yang lebih efisien dan murah, pelabuhan juga membuka peluang usaha baru di sektor pendukung, seperti jasa transportasi, kuliner, perhotelan, koperasi, dan usaha kecil menengah lainnya.

Oleh karena itu, peran pelabuhan perikanan tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, mendorong pembangunan daerah, serta mempercepat realisasi visi ekonomi biru yang berkelanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan II tahun 2025 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja

2025 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2025 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

The background of the slide features an abstract geometric pattern. It consists of various-sized blue cubes and hexagons, some of which are 3D-rendered. These shapes are interconnected by a network of thin, light-blue lines that form a complex, web-like structure. The overall aesthetic is modern and technical.

2025

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perikanan tangkap nasional, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan arah strategis yang terukur.

Dalam kerangka tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengimplementasikan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat untuk menjamin penyelarasan antara strategi, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Sasaran strategis yang ditetapkan berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan program, pengalokasian sumber daya, serta pengukuran hasil kinerja jangka menengah (5 tahunan).

Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025 terdiri dari lima sasaran utama dengan total 18 indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat.
 - a. Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab.
 - a. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen).
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen).
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen).
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai).
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - a. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
 - d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks).
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen).
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai).
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks).

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali.

Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi	Pola Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.012,12	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	8.590,89	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	60	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,1	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	725	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	85	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi	Pola Perhitungan	Penanggung Jawab
	13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	87	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	76	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,5	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2025

Dalam rangka mengimplementasikan strategi pencapaian sasaran jangka menengah dan memastikan pelaksanaan program yang efektif, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja selama satu tahun anggaran. Rencana kinerja ini disusun untuk mengarahkan upaya pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, baik pada level sasaran strategis maupun pada tingkat operasional kegiatan. Setiap indikator ditetapkan dengan target yang terukur, relevan dengan visi dan misi organisasi, serta disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 juga bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendukung penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) melalui pendekatan berbasis hasil (result-based management). Strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana kinerja tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	987.524.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.158.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.818.746.000
Total Anggaran PPS Bungus Tahun 2025		13.840.428.000

Anggaran di atas mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam menjalankan program secara efisien dan tepat sasaran. Setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian lima sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk peningkatan PNBP, produktivitas perikanan, tata kelola pelabuhan, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan manajemen internal.

RENCANA AKSI

Rencana Aksi merupakan turunan operasional dari target-target indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, khususnya untuk perspektif Internal Proses dan Pembelajaran & Pertumbuhan (Learning and Growth) dalam kerangka Balanced Scorecard. Rencana ini menjadi dokumen penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Secara fungsional, rencana aksi digunakan sebagai:

- Alat pemantauan triwulanan terhadap capaian indikator output kegiatan.
- Instrumen identifikasi permasalahan teknis maupun administratif yang menghambat kinerja.
- Dasar penetapan tindak lanjut dan langkah korektif pada triwulan berikutnya agar target tetap tercapai.

Rencana aksi PPS Bungus tahun 2025 mencakup rincian kegiatan, unit penanggung jawab (tim kerja), alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaan yang tersebar dalam empat triwulan. Fokus utama diarahkan pada pencapaian indikator terkait tata kelola pelabuhan, pelayanan internal, dukungan manajerial, serta peningkatan kompetensi dan efisiensi organisasi.

Berikut adalah tabel rencana aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2025:

MATRIKS RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2025

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sesuai target Kegiatan	TARGET											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1 Nilai PNSP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																		
	1	Penelitian: PNSP Nur SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Manajemen Usaha	-	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat																		
2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional berhitung Hutan Tangkapan Ikan (2H11) di Pelabuhan Perikanan (2308.BGA.002.052)	Rp21.787.000	1	Paket	-	-	-	-	3.880.000	-	-	-	-	-	17.907.000	
			Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Peningkatan Ikan Tangkap (2341.QDA.001.051)	Rp23.712.000	1	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.595.000	-	20.117.000
			Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penangkapan ikan yang baik (CPB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di pelabuhan perikanan. (2308.BGA.002.052)	Rp10.000.000	1	Paket	-	-	-	-	-	1.210.000	-	-	-	-	-	9.790.000
			Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan (2342.EBA.003.050.0)	Rp1.600.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-
			Ekstensi Pemutakhiran dan evaluasi pengumpulan data statistik tangkap Dijalan Perikanan Tangkap (2342.EBA.003.050.0)	Rp14.400.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab																		
4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pemeriksaan pemeliharaan pengusahaan yang dihasilkan dari hasil evaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Rp790.004.000	1	Paket	-	4.321.000	-	13.771.300	13.493.600	23.156.000	20.027.000	10.014.000	7.000.000	6.555.000	1.000	106.342.000
			Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPN di pelabuhan perikanan (2308.BGA.002.056)	Rp28.035.000	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	3.103.000	-	-	-	24.932.000
			Pelaksanaan tata kelola dan operasional PPP di pelabuhan perikanan. (2308.BGA.002.057)	Rp31.434.000	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.000	-	-	27.331.000
			Layanan Pemutakhiran (Pembayaran Gaji dan Tunjangan (2342.EBA.004.001.A)	Rp7.361.629.000	1	Layanan	345.303.300	476.601.200	679.066.600	450.369.700	461.362.000	956.022.300	451.672.000	451.072.000	432.287.300	311.072.000	321.042.300	1.868.796.300
			Bunga Pita dan Cita (2342.EBA.004.001.E)	Rp600.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	300.300	-	-	-	-	-
5	Tingkat Pelayanan Keefektifan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Manajemen	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional Keefektifan di pelabuhan perikanan (2308.BGA.002.051)	Rp11.303.000	1	Paket	-	1.550.000	-	-	1.845.000	15.528.000	-	7.700.300	-	-	6.400.000	78.698.000
			Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Buku Pengumpulan Ikan (2341.QAB.001.051)	Rp10.440.000	100	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224.000	-

NO	SASARAN/INDIKATOR	Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sesuai target Kegiatan	TARGET											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
3	Peningkatan Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Samudra dan Perikanan	Perawatan Sedang Kertas. (2342.EBA.994.002.A)	Rp20.900.000	1	Layanan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-
			Perawatan Jembatan Jalan dan Molen (2342.EBA.994.002.B)	Rp140.977.000	1	Layanan	1.500.000	4.000.000	19.940.000	5.552.000	10.330.000	7.600.000	7.000.000	3.000.000	18.000.000	7.900.000	5.000.000	40.400.000
			Perencanaan Pembaruan Fasilitas Perikanan. (2342.EBA.994.002.C)	Rp21.701.900	1	Layanan	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	11.701.000	-
			Langganan Daya dan Jasa (2342.EBA.994.002.D)	Rp971.224.000	1	Layanan	83.694.000	80.690.000	84.765.000	91.090.000	96.900.000	96.500.000	90.500.000	90.500.000	96.500.000	92.699.000	9.500.000	79.370.000
			Efisiensi Operasional dan Pemeliharaan Perairan (2342.EBA.994.002.H)	Rp1.325.996.900	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan dan Rehabilitasi pemukiman perikanan. (2342.EBB.971.001)	Rp100.000.000	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	
4. Peningkatan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkearifan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																		
5	Kapal Perikanan (di daerah yang memiliki ketertarikan)	Tim Kerja Koordinasi	-	-	40	Kapal	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
6	Tingkat Pemenuhan Pemupukan Bioteknologi Kapal Perikanan	Tim Kerja Koordinasi	-	-	1	Documen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																		
10	Nilai Pembangunan Zona Integritas (Zona Integritas Berbasis Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Purifikasi Konstruksi Publik dan Peningkatan Pembangunan Zona Integritas (2342.EBA.994.001.A)	Rp2.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	
			Presentasi Rekomendasi Hasil PA	-	4	Layanan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
12	Nilai PM SAVK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Review dan Penguatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. (2322.EBA.994.002.A)	Rp4.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	2.600.000	-	1.400.000	-	200000
			Efisiensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. (2342.EBA.994.002.B)	Rp20.900.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.000.000
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Efisiensi Evaluasi dan Penilaian Organisasi di lingkungan KOP (2342.EBA.999.001.B)	Rp18.900.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900.000
			Pengadaan Pelukan Dinas Pegawai. (2342.EBA.994.002.C)	Rp15.000.000	1	Layanan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Presentasi Rencana Umum Peng	Tim Kerja Dukungan manajerial	Pencapaian, Pengembangan dan Peningkatan Disiplin Pegawai. (2342.EBC.994.001)	Rp20.900.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	2400000	-	-	31.500.000
			Presentasi Rencana Umum Peng	-	4	Layanan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

NO	SASARAN/INDIKATOR	Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sesuai target Kegiatan	TARGET											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
16	Peningkatan Pengelolaan ASN di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Pengadaan Perangkat Perangkat Dato dan Komunikasi. (2342.CAN.555.001)	Rp118.120.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.120.000
			Pengadaan sarana perikanan. (2342.CAN.551.001)	Rp20.900.000	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.900.000
			Operasional Perikanan (2342.EBA.694.002.F)	Rp1.649.627.000	1	Layanan	-	72.430.000	819.000.000	103.170.000	150.000.000	106.600.000	119.900.000	131.870.000	119.000.000	130.500.000	116.000.000	649.850.000
			Pelaporan Keuangan Lingkup Ditem Perikanan Tangkap. (2342.EBA.994.004.A)	Rp14.400.000	1	Layanan	141.000.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
			Efisiensi Pengelolaan keuangan lingkup Ditem Perikanan Tangkap. (2342.EBA.994.004.B)	Rp118.340.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.340.000
17	Rilis Kinerja Pencapaian Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Pelaksanaan Penanaman Program dan Anggaran Sektir Industri. (2342.EBA.652.003.A)	Rp9.500.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	8.500.000	-	-	-	-	-
			Efisiensi Pengawasan aset aset internal kerja, evaluasi dan tingkatan teknis pencapaian dan anggaran (2342.EBA.652.003.B)	Rp68.400.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	65.400.000	-	-	-	-	-
18	Nilai Terwujudnya Masyarakat Berkeadilan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Layanan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

Ditandatangani di : Padang
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



The background of the slide features an abstract geometric pattern. It consists of numerous blue cubes of varying sizes, some of which are 3D-rendered with visible faces. These cubes are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, web-like structure. The overall aesthetic is modern and technical, suggesting a focus on data, technology, or engineering.

2025

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuju pendekatan Balanced Scorecard (BSC), setiap unit kerja diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kinerjanya dengan arah strategis organisasi. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) turut berperan aktif dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPT melalui pelaksanaan sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah diturunkan dari tingkat pusat.

Selain mengacu pada IKU yang ditetapkan oleh DJPT, PPS Bungus juga menetapkan indikator kinerja tambahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPT berjalan secara efektif, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap secara menyeluruh.

Tabel 3. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET TW I	TARGET TW II	REALISASI TW I	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.012,12	400	900	390,97	818,74	90,97%
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	8.590,89	2.050	4.150	2.424,10	4.944,14	119,14%
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100	-	-	-	-	-
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86	86	86	91,08	90,42	105,14%
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82	-	-	-	-	-
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	60	-	-	-	-	-
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,10	30,1	30,10	94,54	94,44	313,75%
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	725	695	705	797	890	126,24%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	TARGET TW I	TARGET TW II	REALISASI TW I	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II
	dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26	-	0,26	-	0,5	192,31%
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5	-	-	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	85	85	85	100	100	125%
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88	-	-	-	-	-
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	87	-	82	-	88,38	107,78%
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	76	76	76	100	0,00	0,00%
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81	-	-	-	-	-
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92	-	85	-	98,04	115,34%
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,5	-	-	-	-	-
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,50	88,5	88,50	97,99	98,62	111,44%

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;

2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pelayanan operasional pelabuhan, pengelolaan sumber daya, maupun peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk menilai sejauh mana capaian tersebut telah terealisasi, dilakukan evaluasi dan analisis terhadap masing-masing sasaran kegiatan. Uraian evaluasi per sasaran kegiatan disampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai PNBP sektor perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus. Capaian ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP yang merupakan seluruh pendapatan non-pajak hasil pelaksanaan fungsi perusahaan PPS Bungus sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum penerimaan ini mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbarui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021, serta Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017.

PNBP di PPS Bungus terdiri atas dua jenis: penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional mencakup berbagai layanan, antara lain: penggunaan tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, peralatan pengolahan, transportasi, jasa tambat kapal (perikanan dan non-perikanan), docking, perbaikan kapal, penyediaan air, bengkel, pas masuk (harian dan berlangganan), kebersihan kawasan dan kolam pelabuhan, serta jasa layanan lainnya.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

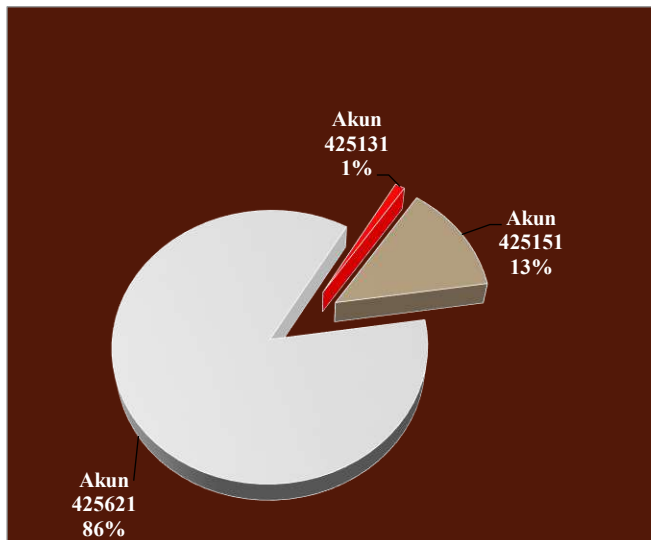
Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 4. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan II (Rp.)
425131	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	29.568.000	8.860.749
425151	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	214.300.000	12.632.040
425151	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	32.500.000	6.332.398
425151	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	55.000.000	83.839.109
425151	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	22.500.000	4.380.000
425151	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	9.000.000	-
425151	Pelayanan Penggunaan Transportasi	2.250.000	1.375.000
425621	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	100.000.000	188.429.535
425621	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	1.000.000.000	81.571.500
425621	Pelayanan Docking dengan Pekerja	140.000.000	44.960.000
425621	Pelayanan Perbaikan Kapal	66.000.000	75.314.000

Anggaran	Jenis Jasa	Target 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan II (Rp.)
425621	Pelayanan Pengadaan Air	34.000.000	32.470.000
425621	Pelayanan Bengkel	2.400.000	1.000.000
425621	Pelayanan Pas Masuk Harian	95.000.000	15.246.000
425621	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	75.000.000	16.140.000
425621	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	11.600.000	7.751.982
425621	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	88.000.000	19.436.750
425621	Pendapatan Jasa Lainnya	35.000.000	219.006.733
TOTAL PENERIMAAN		Rp2.012.118.000	Rp818.745.796



Gambar 3. Penerimaan PNBP TW II Tahun 2025 untuk Kapal Non Perikanan sebesar Rp81.571.500.

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai Rp818.745.796 dari total target tahunan sebesar Rp2.012.118.000, atau sekitar **40,69%**. Pendapatan terbesar berasal dari Pelayanan Pendapatan Jasa Lainnya dengan realisasi sebesar Rp219.006.733, yang bahkan telah melampaui target tahunan sebesar Rp35.000.000. Selain itu, Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan juga menunjukkan pencapaian signifikan dengan realisasi Rp118.429.535 dari target Rp100.000.000. Kontribusi penting lainnya berasal dari Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp83.839.109 dan Pelayanan Tambat

Beberapa jenis layanan lainnya juga mulai menunjukkan realisasi meskipun masih di bawah target, seperti Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (Rp8.860.749), Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan (Rp12.632.040), Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan (Rp6.332.398), Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan (Rp4.380.000), Pelayanan Penggunaan Transportasi (Rp1.375.000), Pelayanan Docking (Rp44.960.000), dari target Rp140.000.000), Pelayanan Pengadaan Air (Rp32.470.000), Pelayanan Pas Masuk, baik harian (Rp15.246.000) berlangganan (Rp16.140.000) dan Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan (Rp7.751.982) maupun Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan (Rp19.436.750). Di sisi lain, terdapat beberapa layanan yang belum menunjukkan realisasi, seperti Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan, yang masih nihil.

Secara umum, meskipun capaian Triwulan II masih di bawah 50% dari target tahunan, sejumlah jenis jasa telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Hal ini mencerminkan potensi peningkatan penerimaan di triwulan berikutnya apabila optimalisasi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan terus ditingkatkan.

Tabel 5. Capaian Penerima PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 1 Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan II			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
2.012,12	818,74	40,69	900	818,74	90,97	700	1420,39	202,91

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa capaian penerimaan PNBP Non-Sumber Daya Alam (Non-SDA) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus hingga akhir Triwulan II Tahun 2025

mencapai Rp818,74 juta, atau 40,69% dari target tahunan sebesar Rp2.012,12 juta. Jika dibandingkan dengan target triwulanan sebesar Rp900 juta, maka capaian ini telah mencapai 90,97%, menunjukkan bahwa secara perencanaan triwulan, kinerja pelabuhan relatif on-track.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di Tahun 2024, yaitu sebesar Rp1.420,39 juta, maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp601,65 juta, atau sekitar 42,36% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan II Tahun 2024, PPS Bungus bahkan berhasil melampaui target triwulannya dengan capaian sebesar 202,91%, sementara pada tahun ini hanya mencapai 90,97%.

Penurunan capaian ini perlu menjadi perhatian, karena bisa mengindikasikan penurunan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan, terutama terkait jasa-jasa fungsional seperti tambat kapal, penggunaan peralatan, docking, atau layanan lainnya. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain: keterlambatan realisasi kegiatan usaha perikanan, menurunnya intensitas kunjungan kapal non-perikanan, atau belum optimalnya penagihan dan pemanfaatan layanan yang berpotensi menghasilkan PNBP.

Untuk menjaga tren penerimaan tetap sesuai dengan target tahunan, perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan, peningkatan kepatuhan pengguna jasa dalam membayar PNBP, serta monitoring rutin terhadap layanan yang menyumbang pendapatan terbesar. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi penerimaan di triwulan berikutnya dan menutup selisih capaian dibanding tahun sebelumnya.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Analisa Keberhasilan

1 Realisasi Hampir Mencapai Target Triwulan

Penerimaan PNBP Non-SDA hingga akhir Triwulan II mencapai 90,97% dari target triwulan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana jangka pendek. Ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan layanan yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan, seperti jasa penggunaan peralatan dan mesin, serta beberapa pelayanan tambat kapal.

2 Kinerja Layanan Tertentu Melampaui Target Tahunan

Beberapa jenis layanan, seperti Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin, Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan, Pelayanan Perbaikan Kapal, dan Pendapatan Jasa Lainnya, telah melampaui target tahunan hanya dalam enam bulan pertama. Hal ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang tinggi dari sektor-sektor tertentu yang perlu terus dioptimalkan.

3 Kesiapan Administratif dan Sistem Penarikan PNBP

Kelancaran penarikan PNBP di sejumlah komponen mengindikasikan bahwa sistem pencatatan, penagihan, dan pelaporan sudah berjalan cukup baik dan responsif terhadap aktivitas operasional di pelabuhan.

Analisa Kegagalan

1 Penurunan Signifikan Dibanding Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 yang mencapai Rp1420,39 juta (202,91% dari target triwulan), maka capaian tahun 2025 turun signifikan sebesar Rp601,65 juta atau sekitar 42,36%. Ini mengindikasikan adanya pelemahan performa secara tahunan, yang perlu diantisipasi agar tidak berdampak pada target tahunan secara keseluruhan.

2 Belum Optimalnya Layanan Berpotensi Tinggi

Beberapa jenis layanan seperti penggunaan peralatan pengolahan, penyewaan gedung/bangunan, dan pas masuk masih menunjukkan realisasi yang rendah atau belum ada sama sekali. Ini mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi pendapatan

yang tersedia di pelabuhan.

3 Ketergantungan pada Jenis Layanan Tertentu

Terdapat dominasi penerimaan dari layanan-layanan tertentu, seperti penggunaan peralatan dan tambat kapal. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko apabila aktivitas di sektor tersebut mengalami penurunan, sehingga diversifikasi sumber PNBP menjadi penting untuk stabilitas pendapatan.

4 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Aktivitas Pelabuhan

Penurunan ini juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan kunjungan kapal non-perikanan, tertundanya kegiatan usaha oleh mitra, atau kebijakan fiskal dan perizinan yang berdampak terhadap intensitas aktivitas di pelabuhan.

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Salah satu program yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Penerimaan PNBP Non-SDA di PPS Bungus" adalah kegiatan Pendampingan dan Supervisi Operasional. Kegiatan ini berperan penting dalam memastikan seluruh layanan fungsional pelabuhan berjalan sesuai dengan prosedur, standar pelayanan, serta ketentuan pemungutan PNBP yang berlaku.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkala, berbagai permasalahan teknis dan administratif dalam proses pelayanan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Supervisi juga memungkinkan pengawasan langsung terhadap unit-unit pelayanan, termasuk layanan tambat kapal, penggunaan fasilitas pelabuhan, dan peralatan pendukung lainnya, yang menjadi kontributor utama terhadap penerimaan PNBP. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jasa dalam melakukan pembayaran PNBP serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelabuhan dalam hal tata kelola keuangan negara dan pelayanan publik.

Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan frekuensi supervisi akibat jumlah SDM pengawas yang terbatas serta belum tersedianya sistem pemantauan digital secara real-time atas layanan berbayar. Hal ini dapat menyebabkan adanya kebocoran potensi penerimaan atau keterlambatan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap capaian IKU.

Lebih lanjut, program pendukung lainnya seperti penguatan sistem penarikan dan pelaporan PNBP, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan, dan peningkatan promosi layanan pelabuhan kepada mitra usaha juga perlu ditingkatkan guna memperluas basis penerimaan dan memperbaiki layanan yang belum optimal. Kegiatan semacam ini belum terlihat secara signifikan pada Triwulan II, yang menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target tahunan secara proporsional.

Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah "Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat". Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

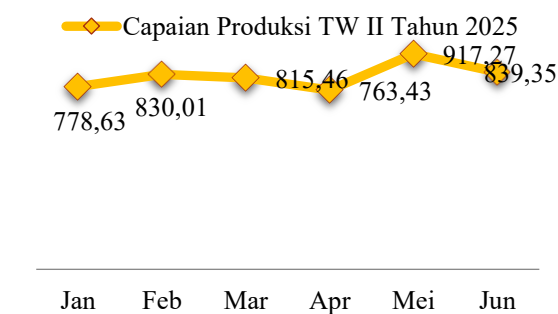
Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah

dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 6. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus TW II Tahun 2025

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	778,63	5.910.211.000
2	Februari	830,01	8.989.895.000
3	Maret	815,46	9.229.971.000
4	April	763,43	8.528.053.000
5	Mei	917,27	9.706.563.000
6	Juni	839,45	9.931.039.000



Gambar 4 Capaian Volume Produksi

Total	4.944,14	52.295.732.000
--------------	-----------------	-----------------------

Selama Triwulan II Tahun 2025, volume produksi perikanan di PPS Bungus menunjukkan tren yang stabil dan cukup positif. Konsistensi ini mencerminkan bahwa kegiatan operasional penangkapan dan pendaratan ikan berjalan sesuai ritme produksi yang wajar dan terjaga. Stabilitas produksi ini menjadi indikator bahwa faktor-faktor pendukung seperti ketersediaan armada, kesiapan infrastruktur pelabuhan, serta kondisi laut relatif kondusif dalam tiga bulan pertama. Meskipun belum menunjukkan lonjakan signifikan, capaian ini memberikan dasar yang kuat untuk menggenjot produksi di triwulan berikutnya, terutama dalam mendukung target peningkatan PNBP dan kinerja pelayanan pelabuhan secara keseluruhan. Optimalisasi fungsi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan tetap menjadi kunci untuk menjaga, bahkan mendorong, peningkatan volume produksi ke depan.

Tabel 7. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

SK 2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat								
IK 2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya			
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
8.590,89	4.944,14	57,57	4.150	4.944,14	119,14	3.100	3.839,28	123,85	

Pada Triwulan II Tahun 2025, produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan capaian yang cukup positif. Total volume produksi yang tercatat sebesar 4.944,14 ton mencerminkan tren yang stabil dan konsisten sepanjang triwulan. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa aktivitas operasional pelabuhan berjalan baik, didukung oleh kesiapan armada, kondisi laut yang relatif kondusif, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti tambat labuh, bongkar muat, dan pengisian BBM.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi produksi tahun ini

mengalami peningkatan secara absolut—dari 3.839,28 ton pada Triwulan II 2024 menjadi 4.944,14 ton pada tahun 2025. Artinya, secara nyata terjadi pertumbuhan volume produksi yang menunjukkan peningkatan kinerja di lapangan. Namun demikian, secara persentase terhadap target, capaian tahun ini (57,57% dari target tahunan) terlihat lebih rendah dibanding capaian tahun lalu (60,49% dari target tahunan), yang disebabkan oleh adanya peningkatan target tahunan pada tahun 2025.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Analisa Keberhasilan

1 Stabilitas Produksi

Kinerja produksi perikanan tangkap selama triwulan II menunjukkan tren yang stabil dengan realisasi volume yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan PPS Bungus dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pendaratan ikan, yang dipengaruhi oleh kesiapan operasional pelabuhan dan armada nelayan.

2 Kondisi Cuaca yang Mendukung

Cuaca laut yang relatif kondusif selama triwulan II turut menjadi faktor pendukung keberhasilan. Nelayan dapat melaut secara rutin tanpa hambatan cuaca ekstrem yang biasanya menjadi kendala signifikan dalam produksi.

3 Fungsi Pelayanan Pelabuhan yang Optimal

Pelayanan tambat labuh, bongkar muat, pengisian air bersih dan BBM, serta ketersediaan fasilitas perbaikan kapal berperan penting dalam mendukung kelancaran operasi kapal penangkap. Koordinasi teknis antar-unit kerja juga turut memperlancar proses pendaratan hasil tangkapan.

Analisa Kegagalan / Tantangan

1 Kapasitas Cold Storage dan Penanganan Ikan

Terbatasnya fasilitas rantai dingin (cold chain) menyebabkan sebagian hasil tangkapan harus segera didistribusikan, tanpa dapat disimpan untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar. Hal ini memengaruhi efisiensi nilai produksi yang tercatat di pelabuhan.

2 Ketidakesesuaian Target dengan Daya Dukung Produksi

Target produksi tahunan yang lebih tinggi pada tahun 2025 tidak seluruhnya disesuaikan dengan analisa potensi dan kapasitas produksi realistis di lapangan. Meskipun capaian riil meningkat, persentase capaian terhadap target tampak rendah karena basis target yang terlalu ambisius.

3 Fluktuasi Harga Ikan dan Daya Tarik Pendaratan

Harga ikan di pasar juga memengaruhi keputusan nelayan dalam memilih lokasi pendaratan. Jika pelabuhan lain memberikan harga atau fasilitas yang lebih menarik, sebagian hasil tangkapan berpotensi tidak tercatat di PPS Bungus, meskipun ditangkap di wilayah yang sama.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi pada Triwulan II tahun 2025 adalah :

1 Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan serta Statistik Lingkup Ditjen Perikanan

Tangkap

Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga akurasi dan keterkinian data produksi perikanan tangkap di lapangan. Dengan pemantauan yang rutin dan sistematis, PPS Bungus mampu mengidentifikasi tren produksi, potensi hambatan operasional, serta kebutuhan intervensi teknis secara tepat waktu. Evaluasi ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh manajemen pelabuhan untuk menjaga stabilitas dan peningkatan produktivitas.

2

Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan untuk Menunjang PNBP Pasca Produksi

Pendataan yang dilakukan secara rutin dan terintegrasi mendukung pencatatan volume hasil tangkapan secara akurat. Kegiatan ini sangat relevan karena tidak hanya mendukung indikator volume produksi, tetapi juga menjadi dasar dalam penghitungan dan penarikan PNBP pasca produksi. Semakin baik pendataan dilakukan, semakin optimal pula potensi penerimaan negara yang dapat dihimpun dari aktivitas perikanan tangkap di PPS Bungus.

Kedua kegiatan ini secara langsung berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan data produksi. Selain itu, kegiatan pendataan juga membantu mendorong nelayan untuk lebih aktif mendaratkan ikan di pelabuhan, karena adanya kejelasan prosedur dan manfaat ekonomi jangka panjang yang diperoleh dari keterlibatan mereka dalam sistem resmi.

Catatan Tantangan atau Potensi Kegagalan

Meskipun program/kegiatan telah mendukung pencapaian kinerja, terdapat beberapa tantangan teknis yang dapat menjadi titik lemah apabila tidak diantisipasi, di antaranya:

1

Keterbatasan SDM Pendata dan Peralatan di Lapangan

Masih terdapat kendala dalam hal ketercukupan dan kapasitas pendata di lapangan, terutama saat aktivitas bongkar ikan berlangsung dalam volume besar. Hal ini dapat menyebabkan data produksi tidak tercatat secara lengkap atau tertunda masuk dalam sistem pelaporan.

2

Tingkat Kepatuhan Nelayan Terhadap Prosedur Pelaporan

Tidak semua nelayan atau pemilik kapal secara aktif melaporkan hasil tangkapannya ke petugas pendata, terutama jika mereka merasa tidak ada insentif langsung. Hal ini dapat berdampak pada tidak optimalnya data produksi yang tercatat sebagai capaian pelabuhan.

3

Keterbatasan Integrasi Sistem Digital

Penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan produksi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pusat secara real time, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data antara pelaporan manual dan digital.

Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan perusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan perusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8 Capaian Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 3 Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)								
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
100	-	-	-	-	-	100	-	-

Pada triwulan I ini, terdapat 20 pengguna yang mengajukan usulan perusahaan di PPS Bungus. Setiap permohonan yang masuk telah melalui proses analisis dan evaluasi yang komprehensif. Meskipun demikian, realisasi capaian indikator persentase permohonan perusahaan yang telah dianalisis dan/atau dievaluasi belum dapat dihitung untuk triwulan ini karena metode perhitungan yang digunakan adalah metode tahunan. Hal ini berarti bahwa data yang relevan untuk indikator tersebut hanya dapat diperoleh dan dianalisis setelah satu tahun penuh.

Selain itu, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 karena indikator persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi baik di tahun 2024 maupun 2025 sama-sama dihitung pada akhir tahun. Oleh karena itu, tidak ada data historis yang tersedia untuk perbandingan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan capaian indikator hanya akan mungkin dilakukan setelah ada data yang memadai dari penerapan indikator ini.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPS Bungus meliputi tindak lanjut yang dilakukan terhadap setiap permohonan perusahaan yang masuk. Selain itu, tingginya ketersediaan peluang investasi di PPS Bungus serta ketersediaan lahan yang signifikan untuk pengolahan dan perusahaan lebih lanjut di dalam pelabuhan turut berkontribusi pada pencapaian ini.

Namun, terdapat tantangan terkait dengan banyaknya lahan dan bangunan yang masih kosong yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini di masa depan. Untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan minat para pemangku kepentingan, tim pelayanan usaha aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi rutin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengukur indeks kepuasan konsumen dan menyampaikan informasi terbaru, termasuk perubahan, keluhan, maupun saran perbaikan. Sosialisasi yang intensif ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat dan memaksimalkan penggunaan lahan serta bangunan yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi adalah pelaksanaan tata kelola serta operasional perusahaan di pelabuhan perikanan. Pelaksanaan tata kelola yang baik melibatkan penerapan prosedur yang jelas dan efisien, sehingga setiap permohonan perusahaan dapat dianalisis dan dievaluasi dengan tepat waktu dan akurat. Selain itu, operasional perusahaan yang efektif

memastikan bahwa semua aspek pengusahaan di pelabuhan berjalan dengan lancar, termasuk koordinasi antara berbagai pihak terkait, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan kinerja secara berkala. Kedua aspek ini “tata kelola dan operasional” saling mendukung untuk memastikan bahwa setiap permohonan pengusahaan yang masuk mendapatkan perhatian yang diperlukan dan diproses sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

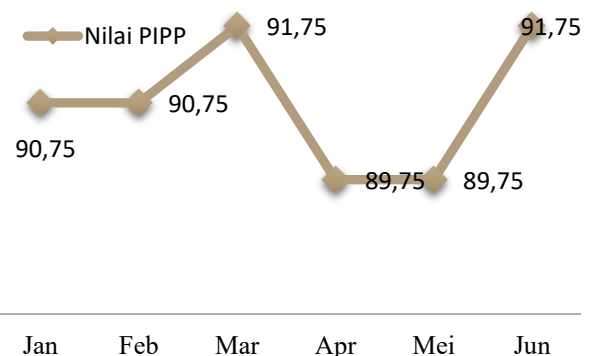
IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking, bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantina Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5, Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi

Berdasarkan data capaian nilai kinerja bulanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencatat rata-rata tingkat kinerja sebesar 90,42 selama Triwulan II Tahun 2025. Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi skor Januari (90,75), Feb (90,75), Maret (91,75), April (89,75), Mei (89,75), dan Juni (91,75). Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan, baik dari aspek pelayanan, operasional, pengelolaan fasilitas, hingga pencatatan produksi.

Nilai kinerja yang berada di atas angka 90 mengindikasikan bahwa PPS Bungus secara umum telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kinerja yang stabil ini mencerminkan adanya koordinasi yang efektif antara unit teknis di pelabuhan, kepatuhan terhadap SOP pelayanan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk nelayan, pengusaha perikanan, dan instansi terkait.



Gambar 5 Capaian Tingkat Kinerja Pelabuhan

Tabel 9. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab		
IK 4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus		
Tahunan 2025		Triwulan II (Tahun 2025)	Triwulan II Tahun Sebelumnya

Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
86	90,42	105,14	86	90,42	105,14	84	89,58	106,64

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja (IK 4) yang mengukur tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan capaian 90,42 poin, melampaui target triwulan maupun tahunan yang ditetapkan sebesar 86 poin, dengan persentase realisasi mencapai 105,14%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan. Tahun 2024, capaian tingkat kinerja pada Triwulan II adalah 89,58 poin dengan target sebesar 84 poin, atau 106,64%. Artinya, meskipun tahun ini target lebih tinggi, PPS Bungus berhasil tidak hanya memenuhi tetapi melampaui target, sekaligus memperlihatkan tren perbaikan kualitas pengelolaan pelabuhan secara menyeluruh.

Kenaikan nilai kinerja ini mengindikasikan bahwa manajemen pelabuhan telah menunjukkan pengelolaan yang lebih optimal, efisien, dan bertanggung jawab, baik dari sisi administratif, teknis, maupun pelayanan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim penginput dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Hal ini juga didukung dengan pembagian tugas penginputan dan monitoring yang dilakukan oleh setiap petugas dalam setiap tim kerja di OPK, TKPU, dan TU.

Dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini masih ditemukan permasalahan berupa kriteria frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP yang masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan agar mencapai nilai maksimal. Namun tetap telah dilaksanakan sinergitas dalam penginputan sehingga dapat tetap tercapai meski belum maksimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 10 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
82	-	-	-	-	-	-	-	-

Realisasi capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dihitung pada Triwulan II Tahun 2025 karena metode pengukurannya bersifat tahunan dan dilakukan secara kumulatif. Indikator ini baru akan dievaluasi pada Triwulan IV setelah seluruh data dan kegiatan operasional kesyahbandaran selama satu tahun terkumpul. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, mengingat pada kedua tahun tersebut pengukuran dilakukan pada waktu yang sama, yaitu di akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan akurat, mencerminkan kualitas pelayanan kesyahbandaran dalam satu tahun penuh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan Fasilitas PPS Bungus dengan masterplan/draft perubahan masterplan PPS Bungus.

Target dan Realisasi

Tabel 11 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab								
IK 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
60	-	-	-	-	-	57	-	-

Realisasi capaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum dapat dihitung pada Triwulan II Tahun 2025 karena metode pengukurannya bersifat tahunan dan dilakukan secara kumulatif. Indikator ini mengukur tingkat efektivitas pengendalian terhadap kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan sepanjang tahun, sehingga perhitungan baru dapat dilakukan pada akhir tahun atau Triwulan IV. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena pada tahun tersebut pengukurannya juga dilakukan di Triwulan IV. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi pengendalian dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh kegiatan pengembangan yang berlangsung selama satu tahun penuh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera Bungus yang telah sesuai dengan masterplan yang telah di riviui pada tahun 2022.

Faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan indikator ini adalah masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun adanya permasalahan dalam upaya pencapaiannya, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

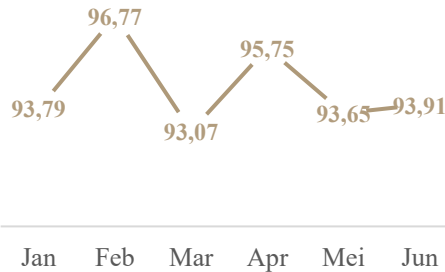
Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Target dan Realisasi

Tabel 12 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal dan Bertanggung Jawab
IK 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
30,10	94,44	313,75	30,10	94,44	313,75	30,10	78,93	262,23



Gambar 6. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN Triwulan II tahun

Capaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan skor kumulatif sebesar 283,31 dan rata-rata capaian bulanan 94,44, kinerja pengendalian lingkungan telah melampaui target yang ditetapkan baik untuk triwulan maupun secara tahunan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan lingkungan pelabuhan yang berjalan efektif dan sesuai dengan standar. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 51,52%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Capaian ini menjadi indikasi bahwa program-program pengelolaan lingkungan di PPS Bungus semakin terarah, terukur, dan berdampak positif terhadap keberlanjutan ekosistem pelabuhan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya keberhasilan capaian IK 7 didukung dengan adanya evaluasi menyeluruh. Semula belum adanya tim kerja untuk mendukung penginputan pada aplikasi SELARASKAN menjadi terbentuk tim kerja yang mewakili masing-masing evidence dalam pengisian aplikasi. Masing-masing personal pada tim kerja memenuhi isian untuk program mandatory, program evidence, dan menginput hasil pada aplikasi SELARASKAN, sehingga pada triwulan II telah terjadi perbaikan dan nilainya bisa mencapai target.

Kondisi yang menjadi penghambat dalam pencapaian IK 7 adalah nilai yang sangat fluktuatif yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi, sehingga kedepannya perlu disesuaikan dan dievaluasi kembali agar tim yang terbentuk benar-benar tim yang dapat mewakili masing-masing data dukung pada setiap kriteria yang ada.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian adalah pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN.

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-4) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

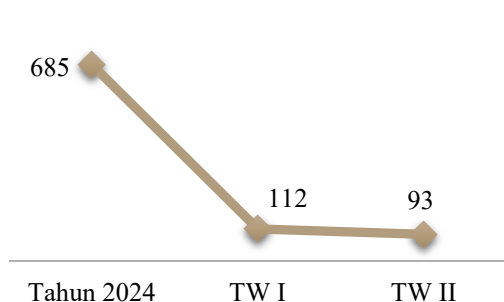
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 13 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan							
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
725	890	122,76	705	890	126,24	392	500	127,55



Gambar 7. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, jumlah Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan tercatat sebanyak 890 kapal. Capaian ini setara dengan 122,76% dari target tahunan dan 126,24% dari target triwulanan, menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1,31%, yang mencerminkan semakin adanya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan daerah. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian ini, dengan memberikan layanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) untuk dua wilayah kerja, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Hal ini memperkuat posisi PPS Bungus sebagai pelabuhan rujukan dalam mendukung legalitas operasional kapal perikanan daerah serta menjamin kelayakan teknis armada perikanan yang beroperasi di wilayah barat Indonesia.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor pendukung tercapainya keberhasilan IK 8 antara lain 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kaaol perikanan, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai dengan baik; 2) adanya dukungan anggaran yang cukup memadai terkait dengan pelaksanaan penerbitan SKKP sehingga pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dapat optimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 9 – Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator kinerja ini merupakan salah satu ukuran penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan, dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. IKU ini dirancang untuk mengukur sejauh mana pemenuhan terhadap

persyaratan legal dan administratif bagi awak kapal perikanan yang bekerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.

Pelaksanaan indikator ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh awak kapal perikanan telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait identitas, kompetensi, hubungan kerja, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja awak kapal secara menyeluruh, sekaligus menciptakan kondisi kerja yang manusiawi dan berkelanjutan di sektor perikanan tangkap.

Tingkat pemenuhan indikator ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan capaian nilai: kategori “Kurang” apabila nilai $\leq 0,25$; kategori “Cukup” untuk nilai antara $> 0,25$ sampai $< 0,50$; kategori “Baik” untuk nilai antara $> 0,50$ sampai $< 0,75$; dan kategori “Sangat Baik” jika nilai $> 0,75$ sampai 1,00. Klasifikasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap tingkat implementasi kebijakan dan komitmen para pemilik kapal serta stakeholder pelabuhan dalam memenuhi hak-hak awak kapal perikanan. Sebagai pelabuhan perikanan strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan nilai indikator ini sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan.

Target dan Realisasi

Tabel 14 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SK 4 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan								
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
0,26	1.288	192,31	0,26	1.288	192,31	-	-	-

Hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, jumlah SPB yang sudah diterbitkan Pelabuhan perikanan Samudera Bungus tercatat sebanyak 1.288 Dokumen. Capaian ini setara dengan 192,31%% dari target tahunan dan 192,31% dari target triwulanan, menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi. Mencerminkan semakin adanya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan dan keselamatan bekerja awak kapal. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian ini, dengan memberikan layanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SBP) kapal perikanan range GT kapal > 5 GT s.d 30 GT.

Perlu juga disampaikan bahwa indikator ini merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis atau capaian pada tahun-tahun sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian, evaluasi terhadap capaian kinerja pada periode ini tidak dapat dilakukan secara longitudinal atau year-on-year. Implementasi indikator ini diharapkan menjadi dasar awal dalam membangun sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak serta persyaratan kerja awak kapal perikanan di masa mendatang, sekaligus sebagai landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola ketenagakerjaan sektor perikanan tangkap.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Analisa terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan menunjukkan adanya beberapa faktor keberhasilan maupun kendala dalam implementasinya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Keberhasilan awal terlihat dari

meningkatnya kesadaran sejumlah pemilik kapal terhadap pentingnya pemenuhan regulasi ketenagakerjaan awak kapal perikanan, terutama setelah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang melibatkan pengelola pelabuhan, instansi kelautan dan perikanan, serta lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Syahbandar telah mulai terbangun dengan cukup baik, meskipun masih perlu penguatan. Komitmen dari para pihak dalam menjadikan indikator ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sumber daya manusia di sektor perikanan juga menjadi aspek positif yang patut dicatat.

Namun demikian, sebagai indikator baru yang diterapkan pada tahun 2025, masih banyak pemilik kapal yang belum memahami secara utuh kewajiban dan prosedur pemenuhan persyaratan administrasi bagi awak kapal, seperti kontrak kerja, sertifikasi kompetensi, dan jaminan sosial. Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan verifikasi data di lapangan, serta belum adanya sistem pelaporan dan integrasi data yang efektif, yang menyebabkan proses pelacakan dan pemantauan berjalan kurang optimal. Dengan demikian, meskipun telah terdapat landasan awal yang mendukung keberhasilan, penguatan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, dan pengembangan sistem informasi menjadi hal krusial untuk memastikan keberhasilan indikator ini dalam jangka panjang.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan menunjukkan bahwa beberapa intervensi telah memberikan kontribusi positif, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Program sosialisasi dan penyuluhan regulasi ketenagakerjaan kepada pemilik kapal, nakhoda, serta awak kapal yang dilaksanakan oleh pengelola pelabuhan bersama instansi terkait telah menjadi faktor pendukung keberhasilan. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perjanjian kerja laut, sertifikasi kompetensi, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di samping itu, pelaksanaan pengawasan terbatas oleh petugas pelabuhan dan sinergi awal dengan lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan juga turut memberikan dampak positif meskipun cakupannya masih terbatas.

Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum optimal dalam mendukung pencapaian indikator ini. Salah satunya adalah belum tersedianya program pendataan dan verifikasi yang sistematis terhadap status kerja awak kapal perikanan. Ketiadaan basis data terpadu menyebabkan kesulitan dalam menilai kepatuhan kapal perikanan terhadap persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, kegiatan pengawasan rutin terhadap pemenuhan hak-hak awak kapal belum berjalan secara intensif karena keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawas di lapangan. Program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi aparat pelabuhan dan stakeholder terkait dalam memahami aspek hukum ketenagakerjaan di sektor perikanan juga belum sepenuhnya tersedia. Di sisi lain, belum adanya sistem informasi digital yang dapat mencatat dan memantau pemenuhan persyaratan secara real-time turut menjadi kendala dalam upaya pengukuran indikator ini secara akurat dan efisien. Oleh karena itu, ke depan perlu dirancang program-program pendukung yang lebih strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendorong pencapaian target kinerja secara maksimal.

Sasaran Kinerja (SK) 5: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-5) yang akan dicapai adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus". Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan komitmen institusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang dinilai berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya dalam membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas sendiri merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih melalui serangkaian perubahan pada aspek kelembagaan.

Penilaian capaian WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didasarkan pada terpenuhinya sejumlah komponen utama, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap komponen tersebut memiliki indikator dan bobot tersendiri yang harus dipenuhi secara konsisten dan terukur. Misalnya, dalam manajemen perubahan, unit kerja dituntut untuk memiliki tim kerja yang efektif, rencana kerja yang realistis, serta komitmen pimpinan terhadap budaya antikorupsi. Sementara itu, dalam aspek pelayanan publik, penilaian mencakup penerapan standar pelayanan, keterbukaan informasi, inovasi layanan, hingga efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.

Capaian nilai dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip reformasi birokrasi, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan. Oleh karena itu, IK ini memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berorientasi pada pelayanan prima, transparansi, serta bebas dari praktik-praktik korupsi. Keberhasilan dalam meraih predikat WBK akan menjadi bentuk pengakuan atas integritas dan profesionalisme unit kerja, sekaligus mendorong peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 10		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
45,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil rekapitulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum menunjukkan capaian, karena perhitungan indikator ini dilakukan secara tahunan atau pada Triwulan 4 tahun 2025.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung dengan, 1) terlaksananya asistensi WBK yang dilakukan bersama dengan tim ortala DJPT, sehingga diperoleh hasil penilaian mandiri bersama tim asistensi; 2) adanya sinergitas antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan pelengkapan seluruh dokumen sesuai ketentuan; 3) adanya tim yang bekerja dengan efektif dan sesuai SOP yang telah ditetapkan, sehingga sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortala DJPT dapat terselesaikan dengan baik. Saat ini yang menjadi kendala dalam

pencapaian Indikator Kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah masih belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Komponen kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK serta pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di Lingkungan KKP. Kegiatan persiapan penetapan zona integritas dilaksanakan dalam pada kegiatan pemenuhan dokumen WBK, penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas PPS Bungus. Serta adanya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Zona Integritas.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2024 s.d. triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Target dan Realisasi

Tabel 16 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
85	100	117,65	85	100	117,65	80	100	125

Hasil rekapitulasi laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2025. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dan tata kelola di lingkungan DJPT, khususnya terkait Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku tanpa adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian yang signifikan. Dengan demikian, capaian indikator ini dapat dianggap mencapai 100 persen, bahkan mencapai 117,65 persen bila dibandingkan dengan target tahunan dan triwulanan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2024, realisasi capaian pada Triwulan I tahun 2025 tetap berada pada angka 100 persen. Namun, secara persentase terdapat penurunan sebesar 7,4 persen yang disebabkan oleh perbedaan target antara tahun 2024 dan 2025, di mana target pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2025. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja, melainkan karena target capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang lebih menantang, sehingga secara proporsional capaian

yang sama menjadi relatif lebih kecil jika dilihat dari segi persentase terhadap target. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan di DJPT berjalan dengan baik dan sesuai harapan, namun juga menuntut upaya terus-menerus untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan seiring dengan peningkatan target di masa mendatang.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan yang paling menonjol adalah tidak adanya temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas, proses bisnis, dan tata kelola di lingkungan DJPT telah berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dari seluruh unit kerja dalam menjalankan fungsi secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Selain itu, capaian indikator yang mencapai 100 persen bahkan 117,65 persen dari target tahunan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan tidak hanya terpenuhi, tetapi pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan risiko juga berjalan sangat baik. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas koordinasi internal dan pengendalian mutu pelaksanaan tugas di lingkungan DJPT.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Analisa terhadap program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP Lingkup DJPT sampai Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung dan kendala yang perlu diperhatikan. Program penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan secara berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan audit internal, monitoring berkala, serta pelatihan dan pembinaan terkait kepatuhan terhadap regulasi telah berhasil meningkatkan kesadaran dan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat dan akuntabel. Selain itu, sinergi yang baik antara unit kerja di lingkungan DJPT dan Inspektorat Jenderal KKP turut memperkuat proses pengawasan dan perbaikan sistem manajemen yang berjalan efektif.

Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Salah satunya adalah belum tersedianya mekanisme penetapan target yang sepenuhnya terukur dan realistis sesuai dengan kapasitas dan kondisi lapangan, sehingga terkadang target yang ditetapkan menjadi terlalu ambisius dan berpotensi menimbulkan gap antara target dan realisasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam beberapa unit kerja menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan hasil kegiatan. Beberapa kegiatan pengawasan juga masih bersifat reaktif dan kurang didukung oleh data analitik yang komprehensif, sehingga peluang untuk mendeteksi risiko dan potensi penyimpangan secara dini menjadi terbatas.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan pelabuhan secara mandiri. Nilai ini menjadi representasi dari komitmen dan kemampuan instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap empat aspek utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Setiap aspek memiliki bobot penilaian tersendiri yang menunjukkan kontribusinya terhadap keseluruhan sistem. Aspek perencanaan kinerja (30%) menilai kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan rencana strategis dan prioritas nasional. Pengukuran kinerja (30%) mengevaluasi keterukuran indikator yang digunakan dan sejauh mana capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan tepat. Pelaporan kinerja (15%) melihat kualitas penyusunan

laporan kinerja, termasuk kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian data yang disajikan. Sedangkan evaluasi kinerja (25%) berfokus pada keberadaan dan efektivitas mekanisme evaluasi internal dalam menindaklanjuti capaian dan kendala kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP menjadi indikator penting karena tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menggambarkan budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Capaian nilai ini menunjukkan tingkat kedewasaan organisasi dalam mengelola program secara terencana, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Semakin tinggi nilai PM SAKIP, maka semakin kuat pula kemampuan pelabuhan dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance serta pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, indikator ini memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, khususnya di sektor perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian Indikator Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 12		Nilai PM Sakip Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
88	-	-	-	-	-	-	-	-

Rekapitulasi capaian untuk Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum tersedia pada Triwulan II Tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh sifat indikator tersebut yang bersifat kumulatif dan hanya dapat diukur secara tahunan. Sesuai dengan ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, proses penilaian mandiri atas implementasi SAKIP mencakup evaluasi atas keseluruhan aspek kinerja selama satu tahun berjalan, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, proses penghitungan nilai PM SAKIP baru akan dilakukan secara menyeluruh pada Triwulan IV, setelah seluruh data dan dokumen pendukung dari berbagai aspek kinerja terkumpul dan dapat dianalisis secara komprehensif.

Penundaan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil evaluasi yang dihasilkan bersifat akurat, objektif, dan benar-benar merefleksikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama satu tahun penuh. Dengan kata lain, penilaian nilai PM SAKIP bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi alat strategis dalam menilai konsistensi penerapan sistem kinerja berbasis hasil serta efektivitas pengelolaan program di tingkat pelabuhan. Oleh sebab itu, hingga akhir Triwulan II, belum dimungkinkan untuk menetapkan nilai capaian sementara, dan penilaian kinerja ini akan dilaporkan secara resmi pada akhir tahun anggaran setelah evaluasi menyeluruh dilakukan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat capaian nilai untuk Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus karena penilaiannya bersifat tahunan dan baru akan dilakukan secara menyeluruh pada Triwulan IV. Namun demikian, beberapa indikator awal yang berkaitan dengan kesiapan dokumen dan pelaksanaan proses perencanaan serta pelaporan menunjukkan adanya langkah-langkah positif yang dapat dikategorikan sebagai potensi keberhasilan awal. Keberhasilan ini tercermin dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan (seperti Renja dan PK), pelaporan kinerja internal yang lebih sistematis, serta upaya peningkatan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara periodik juga berkontribusi pada penguatan

budaya kinerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pelabuhan.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan atau potensi kegagalan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, di mana beberapa indikator belum sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis. Selain itu, kualitas pelaporan dan dokumentasi pendukung masih memerlukan perbaikan dalam hal konsistensi, ketepatan data, dan narasi analisis capaian kinerja. Rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan program dan perencanaan ulang juga dapat menjadi titik lemah dalam proses penilaian SAKIP. Apabila hal-hal ini tidak segera diperbaiki sebelum proses evaluasi di Triwulan IV, maka akan berdampak terhadap rendahnya nilai akhir yang diperoleh.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian indikator ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan siklus manajemen kinerja sepanjang tahun, kualitas dokumentasi, serta efektivitas koordinasi lintas unit dalam menyusun dan menindaklanjuti setiap aspek evaluasi SAKIP. Upaya perbaikan yang berkelanjutan dan pemantauan rutin akan menjadi kunci utama untuk mencapai nilai PM SAKIP yang optimal pada akhir tahun.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP sangat dipengaruhi oleh efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Sejumlah program dan kegiatan telah secara langsung menunjang keberhasilan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Salah satu kegiatan yang berkontribusi besar adalah penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu dan sesuai pedoman, seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta laporan kinerja triwulanan. Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP oleh tim internal atau dari instansi pembina juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management).

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara periodik serta pelaporan kinerja yang terdokumentasi dengan baik menjadi komponen penting dalam memastikan keberlangsungan siklus manajemen kinerja. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendukung keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel. Program penguatan kapasitas SDM juga memainkan peran penting dalam membangun kompetensi teknis dalam memahami indikator, menyusun laporan, dan melakukan evaluasi secara berkualitas.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku

kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;

- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Target dan Realisasi

Tabel 18 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 13		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
87	88,38	101,57	82	88,38	107,78	80	74,22	92,78

Indeks capaian nilai IP ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada semester satu tahun 2025 mencapai 88,38 atau sebesar 107,78% dari target semester satu sebesar 82. Nilai ini telah melampaui target semester yang ditetapkan sebesar 82, dengan persentase capaian mencapai 107,78%. Pencapaian ini menggambarkan kinerja ASN yang baik dan menunjukkan bahwa para pegawai telah bekerja dengan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Upaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan adanya arah yang positif melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain: (1) pemberian akses dan kesempatan bagi ASN untuk mengikuti berbagai bentuk pelatihan, seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, serta kursus, webinar, seminar, workshop, magang, dan kegiatan sejenis yang relevan dengan bidang tugas masing-masing; (2) penyampaian himbauan secara aktif dari bagian kepegawaian kepada pegawai, khususnya bagi yang belum memenuhi standar minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun; serta (3) adanya partisipasi aktif dari sebagian besar ASN dalam mengikuti pelatihan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan awal dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap pentingnya pengembangan diri serta dukungan organisasi dalam memfasilitasi kebutuhan kompetensi pegawai. Selain itu, ketersediaan berbagai platform pelatihan daring turut mempermudah akses ASN untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tanpa terkendala waktu dan lokasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang berpotensi menjadi hambatan pencapaian indikator ini secara optimal. Di antaranya adalah belum meratanya tingkat partisipasi ASN dalam kegiatan pelatihan, terutama di kalangan pegawai yang mengalami keterbatasan waktu

karena beban kerja operasional. Selain itu, belum semua program pelatihan yang diikuti terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian sehingga berdampak pada keterlambatan verifikasi data untuk penilaian Indeks Profesionalitas. Aspek pendokumentasian serta pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi juga masih perlu diperkuat agar seluruh aktivitas dapat diakui secara administratif dan tercatat secara akurat.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur tingkat transparansi dan kesiapan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyusunan dan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). RUP merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan seluruh rencana kegiatan pengadaan barang/jasa selama satu tahun anggaran. Publikasi RUP secara terbuka di SiRUP merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan informasi publik.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan nilai total pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan pada SiRUP dengan nilai total pagu pengadaan yang dikelola oleh unit kerja. Pagu pengadaan dihitung berdasarkan total anggaran program dikurangi belanja pegawai serta belanja non-pengadaan. Dengan demikian, semakin tinggi persentase RUP yang diumumkan di SiRUP, maka semakin baik kualitas perencanaan dan pengelolaan pengadaan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Penilaian terhadap IKU ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 Ayat (1), yang menegaskan bahwa pengumuman RUP wajib dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk menjamin prinsip transparansi dan keadilan dalam proses PBJ. Dengan indikator ini, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat memantau dan mengevaluasi kinerja perencanaan pengadaan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan PBJ direncanakan secara tepat waktu, sesuai aturan, dan terbuka untuk public.

Target dan Realisasi

Tabel 19 Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 14		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Triwulan I (Tahun 2025)			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
76	100	117,65	76	0	0,00	-	-	-

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator menunjukkan hasil yang kurang baik, yaitu sebesar

0,00%, tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 76%. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 0,00% dari target triwulanan dan target tahunan 117,75%. Hal ini mencerminkan bahwa Rencana Umum Pengadaan yang direncanakan di triwulan II ada yang tidak diumumkan secara tepat waktu dan lengkap melalui platform SiRUP dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana berdampak efisiensi anggaran.

Capaian ini juga menunjukkan kinerja yang konsisten pada awal tahun 2025. Karena indikator ini merupakan indikator baru, maka tidak terdapat data pembandingan pada Triwulan II tahun sebelumnya. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan keterbukaan proses pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Kegagalan dalam pencapaian Indikator Kinerja ini ditunjukkan melalui capaian sebesar 0,00%, yang melampaui target triwulanan dan tahunan sebesar 76%, atau setara dengan 0,00% dari target. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan kesiapan unit kerja dalam merencanakan serta mempublikasikan seluruh paket pengadaan secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain koordinasi yang baik antara unit perencanaan dan tim pengelola pengadaan barang/jasa, serta pemahaman yang kuat terhadap regulasi terbaru terkait penyusunan RUP. Selain itu, ketersediaan data perencanaan program sejak awal tahun anggaran memudahkan proses pemaketan dan input ke dalam SiRUP. Komitmen pimpinan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting yang mendorong tercapainya hasil maksimal.

Di sisi lain, potensi kegagalan tidak dapat dicegah sejak awal melalui monitoring rutin terhadap jadwal input RUP karena Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terdampak Efisiensi Anggaran. Namun demikian, perlu diantisipasi tantangan ke depan seperti perubahan kegiatan atau anggaran dalam tahun berjalan yang berpotensi memengaruhi konsistensi data RUP. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pembaruan RUP secara dinamis menjadi penting agar indikator ini dapat terus dijaga capaian optimalnya sepanjang tahun.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini sangat didukung oleh program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan pengelolaan data pengadaan secara digital. Program pelatihan dan bimbingan teknis kepada staf pengadaan mengenai tata cara penyusunan RUP dan penggunaan sistem SiRUP menjadi kunci utama dalam memastikan proses input data berjalan lancar dan sesuai jadwal. Selain itu, kegiatan koordinasi rutin antara unit perencanaan anggaran dan tim pengadaan juga berperan penting dalam menyelaraskan rencana pengadaan dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga meminimalisir revisi yang berulang.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadaan, seperti sistem SiRUP yang terintegrasi, mempermudah proses publikasi RUP secara transparan dan cepat. Ketersediaan data pendukung yang lengkap dan akurat juga mempercepat proses penyusunan RUP sehingga capaian target dapat terpenuhi bahkan melampaui ekspektasi.

Namun, kegagalan atau hambatan dapat muncul apabila terdapat kendala dalam koordinasi lintas unit yang menyebabkan keterlambatan pengumpulan data, atau jika terdapat perubahan mendadak dalam pagu anggaran dan program kerja yang belum diakomodasi secara cepat dalam RUP. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis pengelolaan SiRUP juga berpotensi menghambat proses pengumuman RUP secara tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan perbaikan komunikasi antar unit menjadi fokus penting untuk mencegah kegagalan dan

memastikan keberlanjutan pencapaian indikator kinerja ini.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pengelolaan BMN merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena mencerminkan akuntabilitas pengelolaan aset negara dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan beberapa unsur utama pengelolaan BMN yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, dengan bobot nilai berbeda untuk setiap aspek:

1. Tingkat Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) – Bobot 12,5%
Mengukur sejauh mana kebutuhan atas BMN direncanakan dengan baik, mencakup kesesuaian antara kebutuhan dan realisasi pengadaan serta pemanfaatannya dalam mendukung operasional pelabuhan.
2. Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Belanja Modal yang Sudah BAST – Bobot 25%
Menilai ketaatan unit kerja dalam mengusulkan penetapan status penggunaan untuk BMN hasil belanja modal, khususnya yang telah diserahterimakan secara formal melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai bentuk legalisasi penggunaan aset.
3. Usulan Penghapusan BMN dengan Kondisi Rusak Berat – Bobot 25%
Menggambarkan ketepatan dalam melakukan pemutakhiran data dan penanganan BMN yang tidak lagi dapat dimanfaatkan, terutama BMN yang dalam kondisi rusak berat. Usulan penghapusan diajukan ke pengguna dan pengelola barang untuk menghindari penumpukan aset tidak produktif.
4. Penggunaan BMN dari Hasil Pengadaan Belanja Modal yang Didukung Dokumen Resmi – Bobot 25%
Mewakili kepatuhan terhadap tata kelola penggunaan aset negara, yaitu bahwa setiap penggunaan BMN hasil belanja modal harus didukung dengan dokumen formal seperti BAST atau Berita Acara Pemakaian.
5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan BMN secara Tepat Waktu – Bobot 12,5%
Meliputi kewajiban pelaporan pengelolaan BMN secara semesteran dan tahunan, yang harus disampaikan sesuai jadwal sebagai bagian dari akuntabilitas pelaporan keuangan negara.

Nilai akhir indikator ini merupakan agregat dari seluruh komponen di atas dan mencerminkan seberapa baik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam mengelola aset negara secara tertib administrasi, taat regulasi, dan transparan. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur teknis, tetapi juga menjadi representasi dari komitmen pelabuhan dalam mendukung reformasi birokrasi melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan profesional.

Target dan Realisasi

Tabel 20 Capaian Indikator Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2025			Triwulan I (Tahun 2025)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
81	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian untuk indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan II belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan untuk indikator kinerja ini bersifat tahunan dan perhitungan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Triwulan IV.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN di PPS Bungus dan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IK 15 antara lain: 1) pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator kinerja Nilai IKPA merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diperoleh dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Target dan Realisasi

Tabel 21 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
92	-	-	85	98,04	115,34	-	-	-

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan II Tahun 2025 belum tersedia, karena metode pengukuran indikator ini bersifat semesteran. Penilaian baru akan dilakukan pada akhir Triwulan II (Semester I) dan Triwulan IV (Semester II), sesuai dengan ketentuan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, capaian indikator ini akan dianalisis setelah seluruh data semester terkumpul secara lengkap.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran

PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sangat bergantung pada efektivitas perencanaan anggaran, ketepatan realisasi belanja, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi pelaksanaan anggaran. Beberapa program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis penyusunan RPD/RKAKL, dan asistensi pelaporan keuangan secara berkala.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran serta rekonsiliasi data keuangan secara rutin setiap bulan turut berkontribusi terhadap pencapaian nilai IKPA yang optimal. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, operator aplikasi, dan pihak terkait lainnya juga merupakan faktor pendukung keberhasilan pengelolaan anggaran secara tepat waktu dan akurat.

Sebaliknya, potensi kegagalan dalam pencapaian IKPA dapat terjadi apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, revisi DIPA yang tidak tepat waktu, atau kendala dalam proses pengadaan barang/jasa yang menyebabkan realisasi belanja tidak sesuai rencana. Selain itu, rendahnya kualitas perencanaan kebutuhan anggaran dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan juga dapat berdampak pada rendahnya nilai IKPA. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi internal, pengawasan melekat, serta penguatan sistem pelaporan dan kontrol internal menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA.

Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Tahunan 2024			Triwulan I (Tahun 2024)			Triwulan I Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
71,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Perhitungan dan rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dilaksanakan karena metode penilaiannya bersifat tahunan. Evaluasi indikator ini dilakukan secara menyeluruh terhadap kualitas perencanaan anggaran selama satu tahun anggaran berjalan, sehingga pengukuran baru akan dilakukan pada akhir Triwulan IV. Penilaian tahunan ini mencakup aspek perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, yang hanya dapat

diukur secara komprehensif setelah seluruh tahapan pelaksanaan anggaran selesai. Dengan demikian, capaian indikator ini akan tersedia setelah seluruh data tahun berjalan dikompilasi dan dianalisis secara menyeluruh.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 5		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus						
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera						
Tahunan 2025			Triwulan II (Tahun 2025)			Triwulan II Tahun Sebelumnya		
Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
88,50	98,62	111,44	88,50	98,62	111,44	88,30	88,30	100

Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai angka 98,62, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,50, dengan tingkat pencapaian sebesar 111,44%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan dukungan manajerial serta respons positif dari masyarakat pengguna layanan di pelabuhan.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, nilai SKM tercatat sebesar 89,83 dengan target 88,30, yang berarti tingkat pencapaian sebesar 100%. Dengan demikian, terdapat peningkatan nilai SKM sebesar 10,32 poin dan kenaikan persentase capaian sebesar 11,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik,

termasuk peningkatan kualitas SDM, perbaikan fasilitas pelayanan, percepatan proses layanan, serta penguatan mekanisme umpan balik masyarakat. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan manajerial kepada para pemangku kepentingan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan adalah kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan dan KPI.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2025, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13.840.428.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2025 tanggal 2 Desember 2024. Namun, terjadi efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran disesuaikan menjadi sebesar Rp10.739.575.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp5.638.954.311,- atau sebesar 40,74% dari total pagu anggaran yang telah disesuaikan.

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2025

Program/Kegiatan		Pagu Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan II 2025	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		1.021.682.000	44.872.583	4,39%
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	987.524.000	43.962.583	4,45 %
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.158.000	910.000	2,66 %
Program Dukungan Manajemen		12.818.746.000	5.594.081.728	43,64 %
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.818.746.000	5.594.081.728	43,64 %
Total		13.840.428.000	5.638.954.311	40,74 %

The background of the slide features an abstract geometric pattern. It consists of numerous blue cubes of varying sizes, some of which are 3D-rendered with visible faces. These cubes are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, web-like structure. The overall aesthetic is modern and technical, suggesting a focus on technology or data.

2025

BAB 4

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan II tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU). diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 106,37 persen.



Gambar 8. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025 melalui aplikasi KINERJAKU milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencatat Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,37%. Dari sebelas indikator kinerja yang ditetapkan, sembilan indikator mencapai atau melampaui target dengan capaian di atas 100%, sementara dua indikator — yaitu Penerimaan PNBP Non-SDA — mencapai 90,97% sedikit di bawah target, — dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus — tidak terlaksana karena terdampak efisiensi anggaran. Indikator-indikator dengan capaian tertinggi antara lain:

1. Volume Produksi perikanan tangkap : 119,18%
2. Tingkat Kinerja : 105,14%
3. Nilai Pengendalian Lingkungan : 313,75%
4. Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan : 126,24%
5. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja : 192,31%
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja : 125%
7. Indeks Profesionalitas ASN : 107,78%
8. Nilai IKPA : 115,34%
9. Nilai SKM : 111,44%

Meskipun secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian indikator tertentu, terutama dalam aspek penerimaan PNBP Non-SDA dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja, PPS Bungus menghadapi beberapa kendala berikut:

1. Fluktuasi aktivitas ekonomi perikanan yang berdampak pada penerimaan PNBP.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan, yang memengaruhi optimalisasi pelayanan.
3. Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban PNBP yang masih perlu ditingkatkan.
4. Koordinasi antar-stakeholder yang belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan.
5. Tidak Terumumkan di aplikasi SiRUP karena kegiatan tidak terlaksana

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan kinerja di triwulan berikutnya dan keseluruhan tahun 2025, direkomendasikan beberapa upaya strategis berikut:

1. Penguatan sistem penarikan dan monitoring PNBP, melalui digitalisasi dan pelibatan pihak ketiga (misal: lembaga verifikasi).
2. Peningkatan sarana pelabuhan dan fasilitas layanan publik, guna mendorong produktivitas dan kepuasan pengguna jasa.
3. Pembinaan dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha perikanan, khususnya terkait kepatuhan kewajiban PNBP.
4. Peningkatan sinergi dan koordinasi lintas sektor, baik di internal KKP maupun dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
5. Monitoring berkala terhadap indikator kinerja, agar potensi deviasi dapat diantisipasi lebih awal.

Dengan komitmen yang kuat serta pelaksanaan upaya tindak lanjut yang terencana, diharapkan PPS Bungus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja positif di sisa tahun 2025, serta memberikan kontribusi optimal terhadap target nasional sektor perikanan tangkap.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMARAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

Nomor : B.1665/PPSB/RC.610/VII/2025 16 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan II Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
di Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya penghitungan Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025, maka dengan ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus Triwulan II Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus sebesar **106,37%**, dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025		% Capaian
				TARGET	CAPAIAN	
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	900	818,47	90,97%
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	4.150	4.944,1	119,18%
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	86	90,42	105,14%
		4	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10	94,44	313,75%
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan	5	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).	705	890	126,24%

	Perikanan Samudera Bungus	6	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja(Nilai).	0,26	0,5	192,31%
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	85	100	125%
		8	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82	88,38	107,78%
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	76	0	0,00%
		10	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	85	98,04	115,34%
		11	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,50	98,62	111,44%

2. Berkas dan dokumen data dukung capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 telah diupload pada link: <https://shorturl.at/edeTF>
3. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan II Tahun 2025 telah di upload pada link: <https://shorturl.at/xCKQa>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Widodo

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widodo**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

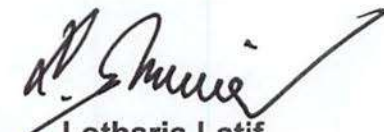
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

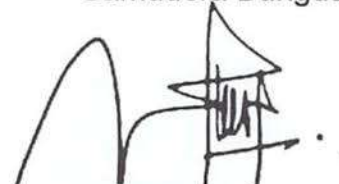
Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus



Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	2.012,12
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	8.590,89
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	86
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	82
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	60
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,10
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	725
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	45,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	88

	13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	87
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	76
	15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81
	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	92
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71,5
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,50

Data Anggaran:

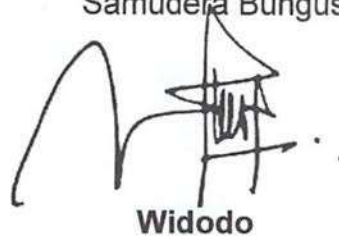
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	987.524.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.158.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.818.746.000
Total Anggaran PPS Bungus Tahun 2025		13.840.428.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Widodo

**RINCIAN TARGET IKU
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
TAHUN 2025**

NO		SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN KOMPONEN	TARGET 2023	TARGET OUTPUT BULANAN							
					TW I	TW II	SM 1	TW III	S.D TW III	TW IV	SM 2	S.D TW IV
1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.												
	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Rp. Juta	2.012,12	400	500	900	550	1.450	562,12	2.012,12	2.012,12
2 Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat.												
	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Ton	8.590,89	2050	2100	4.150	2170	6.320	2270,89	8.590,89	8.590,89
3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab.												
	3	Persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	100	-	-	-	-	-	100	100	100
	4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	82	-	-	-	-	-	82	82	82
	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	60	-	-	-	-	-	60	60	60
	7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.												
	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.	Kapal	725	695	705	705	715	715	725	725	725
	9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.	Nilai	0,26	-	-	0,26	-	-	0,26	0,26	0,26
5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.												
	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	45,5	-	-	-	-	-	45,5	45,5	45,5

11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	85	85	85	85	85	85	85	85	85
12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	88	-	-	-	-	-	88	88	88
13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Indeks	87	-	-	82	-	-	87	87	87
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	76	76	76	76	76	76	76	76	76
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Persen	81	-	-	-	-	-	81	81	81
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	92	-	-	85	-	-	92	92	92
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Nilai	71,5	-	-	-	-	-	71,5	71,5	71,5
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50

Padang, 30 Januari 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



MATRIKS RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2025

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Satuan target kegiatan	TARGET												
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																		
	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Pelayanan Usaha	-	-	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat																		
	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan (2338.BGA.002.052)	Rp21.787.000	1	Paket	-	-	-	-	3.880.000	-	-	-	-	-	17.907.000	
				Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur. (2341.QGA.001.051)	Rp23.712.000	1	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.589.000	-	20.123.000
				Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan. (2338.BGA.002.053)	Rp10.602.000	1	Paket	-	-	-	-	-	1.210.000	-	-	-	-	-	9.392.000
				Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan. (2342.EBA.963.053.B)	Rp1.600.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-
				Efisiensi Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. (2342.EBA.963.053.B)	Rp14.400.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.400.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab																		
	3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola dan operasional pengusahaan di pelabuhan perikanan. (2338.BGA.002.054)	Rp706.004.000	1	Paket	-	4.821.000	-	13.771.000	15.493.000	23.150.000	20.027.000	16.814.000	7.000.000	6.585.000	1.000	598.342.000
				4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan. (2338.BGA.002.056)	Rp28.035.000	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	3.103.000	-
	Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan. (2338.BGA.002.057)	Rp31.434.000	1				Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.000	-	-	27.331.000
	Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan. (2342.EBA.994.001.A)	Rp7.361.929.000	1				Layanan	246.903.200	476.904.200	976.046.600	450.349.700	451.362.000	895.022.000	451.072.000	451.072.000	432.287.300	311.072.000	321.042.000	1.898.796.000
	Biaya Pos dan Giro. (2342.EBA.994.001.E)	Rp600.000	1				Layanan	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (2338.BGA.002.051)	Rp113.032.000	1	Paket	-	1.550.000	-	-	1.845.000	16.928.000	-	7.700.000	-	-	6.400.000	78.608.000	
			Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan. (2341.QKB.001.051)	Rp10.446.000	100	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.224.000	-	9.222.000

NO.	SASARAN/INDIKATOR		Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Satuan target kegiatan	TARGET											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	Perawatan Gedung Kantor. (2342.EBA.994.002.A)	Rp20.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-
				Perawatan Jaringan, Jalan dan Mesin (2342.EBA.994.002.B)	Rp140.977.000	1	Layanan	1.500.000	4.600.000	19.840.000	5.552.000	16.338.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	18.058.000	7.000.000	5.686.000	40.403.000
				Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Perkantoran. (2342.EBA.994.002.C)	Rp21.761.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-		-	11.761.000	-
				Langganan Daya dan Jasa. (2342.EBA.994.002.D)	Rp971.224.000	1	Layanan	83.664.000	80.690.000	84.765.000	91.090.000	96.500.000	96.500.000	96.500.000	96.500.000	96.500.000	62.639.000	6.500.000	79.376.000
				Efisiensi Operasional dan Pemeliharaan Kantor. (2342.EBA.994.002.H)	Rp1.329.606.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.329.606.000
				Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran. (2342.EBB.971.051)	Rp180.000.000	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000
7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan. (2338.BGA.002.055)	Rp76.630.000	1	Paket	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.500.000	1.500.000	5.500.000	3.970.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50.160.000
4 Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																			
8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	40	Kapal	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.																			
10		Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Forum Konsultasi Publik dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (2342.EBA.950.051.A)	Rp2.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-
11		Persentase Rekomendasi Hasil Pe	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Laporan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
12		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Money dan Pelaporan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. (2342.EBD.953.052.A)	Rp4.400.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	2.568.000	-	1.632.000	-	200000
				Efisiensi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. (2342.EBD.953.052.B)	Rp39.600.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000
13		Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Efisiensi Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP. (2342.EBA.950.051.B)	Rp18.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. (2342.EBA.994.002.G)	Rp49.000.000	1	Layanan	-	-	49.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai. (2342.EBC.954.051)	Rp35.000.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	3499000	-	-	31.501.000
14		Persentase Rencana Umum Peng	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Laporan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

NO.	SASARAN/INDIKATOR	Unit PJ (Tim Kerja)	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	TARGET											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. (2342.CAN.955.051)	Rp416.120.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.120.000
			Pengadaan sarana perkantoran. (2342.EBB.951.051)	Rp56.862.000	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.862.000
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Operasional Perkantoran. (2342.EBA.994.002.F)	Rp1.949.927.000	1	Layanan	-	74.433.000	419.034.000	103.118.000	152.631.000	146.946.000	119.649.000	131.671.000	119.601.000	116.505.000	116.489.000	449.850.000
			Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. (2342.EBD.955.054.A)	Rp14.400.000	1	Layanan	14.100.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
			Efisiensi Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. (2342.EBD.955.054.B)	Rp116.340.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.340.000
17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	Tim Kerja Dukungan manajerial	Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Serta Rakernis. (2342.EBD.952.053.A)	Rp9.594.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	9.594.000	-	-	-	-	-
			Efisiensi Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran. (2342.EBD.952.053.B)	Rp65.406.000	1	Layanan	-	-	-	-	-	-	65.406.000	-	-	-	-	-
18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.	Tim Kerja Dukungan manajerial	-	-	4	Laporan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Juni 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

